BAB III
DATA HASIL KERJA PRAKTEK

3.1. Mengenai PT Pos Indonesia (Persero) Soreang

3.1.1. Sejarah Singkat PT Pos Indoensia

Pos merupakan organisasi yang besar dalam pelayanan lalu lintas berita, uang dan barang. Pos mulai beroperasi ribuan tahun yang lalu dan sekarang pos merupakan jaringan yang vital di setiap negara.

Sepanjang sejarah manusia pelayanan pos merupakan salah satu jenis pelayanan komunikasi komunikasi yang paling tua di banyak bagian dunia, terdapat tanda – tanda adanya penyelenggaraan pos di masa lalu yang ditata dalam organisasi yang teratur dan rapi misalnya : Tiongkok, Memsir, Persia dan Romawi bahkan di Amerika Serikat.

Penyelenggaraan perposan di Indonesia sudah ada di berebagai kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit dan lain – lain. Di jaman Veredigde Oost Indische Compagine (VOC), perposan mulai berkembang ditandai dengan berdirinya Kantor Pos pertama di Batavia (sekarang Jakarta) tahun 1864. Pentingnya peranan pos waktu itu dapat terlihat atau terbaca pada pemberian nama ' ***Jalan Pos Raya*** " untuk jalan raya terpanjang yang pertama di Indonesia dari Anyer ke Panarukan melalui liku – liku perjalanan sejarah perposan Indonesoa terus berkembang menjadi salah satu alat perjuangan dan pendukung utama kegiatan umum pemerintah dan pembangunan.

Sebelum Dinas Pos menjadi PT Pos Indonesia beberapa kali mengalami perubahan pada tahun 1946 , Dinas Pos sebagai Jawatan berada di bawah pengawasan directure production en civile majerijinen. Dan Pada tahun 1961

diubah menjadi perusahaan Indische Bendrijien wet (IBW). Dan akhirnya pada tahun 1965agar postel mencapai daya guna dan daya gerak yang setinggi – tingginya maka didirikan PN Pos.

Tujuan pendiriannya untuk membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat adildan makmur.

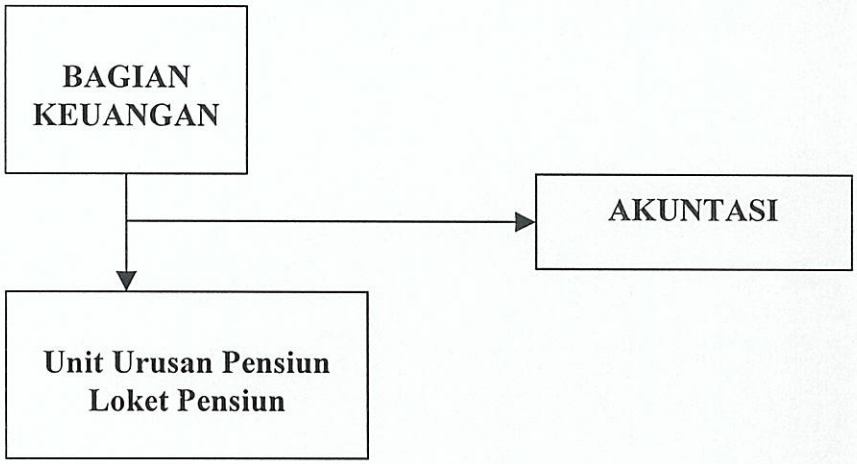
Tahun 1987 melalui proses penetapan PP No. (Tahun / 1987 / LN tahun 1978 10 PN Pos dan Giro), kemudian pada tahun 1984 disesuaikan kembali dan diubah dengan PP No. 36.

Dinas Pos dan Giro merupakan cabang produksi jasa yang penting serta berfungsi vital sebagai prasarana pembangunan nasional, di samping itu untuk menyempurnakan dan mendayagunakan negara Pos dan Giro.

Bahwa dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro, maka perusahaan umum yang didirikan dengan PP No.24 tahun 1984 dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 tahun 1969, maka ditetapkan PT Pos Indonesia . Maksud dan tujuannya adalah bahwa perusahaan perseroan adalah untuk menyelenggarakan:

- Usaha jasa Pos dan Giro
- Usaha – usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3.1.2. Struktur Organisasi Bagian Pensiun



Job Description Urusan Pensiun / Loket Pensiun

- Memeriksa / menjumlahkan / mencocokan jumlah uang tiap jenisnya.
- Memeriksa / menjumlahkan / mencocokan / kwitansi potongan Bank
- Mengirim Dapen dan Kwitansi potongan ke KPD
- Membuat rekening Koran pensium dan potongan pensiun
- Mengerejakan carik, dapen dan pemasukan uangnya ke dalam sampul setelah diperhitungkan dengan besar uang / kwitansi bank
- Membuat buku – buku tentang pensiun

3.2. Kegiatan Dan Hasil Kerja Praktek

3.2.1. Proses Pembayaran Pensiun

Dalam melaksanakan Proses Pembayaran Pensiun, PT Taspen (Persero)mengirimkan DAPEM ke PT Pos Indonesia (Persero) Soreang. DAPEM diserahkan ke Bagian Loket Pensiun . Setelah itu baru diproses dan

dipisahkan berdasarkan jenis pensiundan nomor urutnya. Setiap tanggal 2 bagian Loket Pensiun mengadakan penyampulan uang pensiun untu dibayarkan kepada penerima pensiun. Pembayaran pensiun dilaksanakan berdasarkan jenis pensiun yaitu:

1. Setiap tanggal 4 pembayaran untuk janda / duda
2. Setiap tanggal 5 pembayaran untuk pensiun ABRI
3. Setiap tanggal 6 pembayaran untuk pensiun PNS

   Setelah masa pembayaran pensiun bulanan atas dasar DAPEM terakhir (tanggal 20 setiap bulan). Bagian Loket pensiun segera membuat surat pertanggungjawaban pembayaran pensiun (SPJP 2P) untuk seluruh pembayaran pensiun dalam wilayah kerjanya.

3.2.2. Masalah dan Penyelesaiannya Pada Pembayaran Pensiun

Diantara masalah yang dihadapi antara lain:

1. Pembayaran pensiun yang tidak diambil

   Pada masalah ini ada beberapa penyebabnya salah satunya adalah dikarenakan pindah kantor bayar dan cara penyelesaiannya yaitu dengan cara menyelesaikan masalah administrasi di kantor yang sebelumnya.

2. Penerima Pensiun Meninggal Dunia

   Apabila penerima pensiun meninggal dunia, sepanjang dalam SK Pensiun Almarhum / Almarhumah belum dicantumkan hak pensiun janda / duda / yatim piatu sebagaimana diatur dalam PP no. 8 / 1989. KC segera meneruskan permohonan pensiun janda / duda / yatim piatu bersangkutan ke pemangku delegasi wewenang (PDW) berkenaan deengan melampirkan:

   1. Surat Permohonan Janda / Duda

2. Asli SK Pensiun Almarhun . Almarhumah
3. Surat keterangan Kejandaan / Kedudaan
4. Surat Nikah / Karis / Karsu / KPI / KPS
5. SPTB
6. Pas poto tanpa tutup kepala ukuran 4 x 6 rangkap tiga
7. Asli Surat Keterangan Kenmatian serendah – rendahnya Lurah / Kepala Desa atau visum dokter (rangkap 2).